



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.2, Desember 2016

OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otonomi dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

RESUME PENELITIAN

- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

REVIEW BUKU

- Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Hlm. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Internasional*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)
Dr. Philips J. Vermonte (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (*Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Otonomi Daerah dan Desa*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP
Devi Darmawan, S.H
Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i–ii
Catatan Redaksi		iii–iv
Artikel		
	• Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia <i>Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham</i>	137–148
	• Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah <i>Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady</i>	149–166
	• Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan <i>Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu</i>	167–191
	• Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa <i>Nyimas Latifah Letty Azizi</i>	193–211
	• Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah <i>R. Siti Zuhro</i>	213–225
Resume Penelitian		
	• Masa Depan Partai Islam di Indonesia <i>Moch. Nurhasim, dkk</i>	227–244
	• Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia <i>Nostalgawan Wahyudhi, dkk</i>	245–260
Review Buku		
	• Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah <i>Yusuf Maulana</i>	261–268
Tentang Penulis		269–270
Pedoman Penulisan		271–275

CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia” mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi” tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul “Otodada dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah” menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otoda untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul “Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia” yang menguraikan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change di beberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 303:324.998

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL
PENGANGGARAN PARTISIPATIF
DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI
TIGA PROVINSI DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar

53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady

**KONTEKS SOSIAL EKONOMI
KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA
DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Kata Kunci: sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

**DESENTRALISASI DAN OLIGARKI
PREDATOR DI WAKATOBI:
PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU
DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

**OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS
DANA DESA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: otonomi desa, efektivitas, dana desa

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

**OTODA DALAM UU PEMDA BARU:
MASALAH DAN TANTANGAN
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politis di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi

Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci : Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "*backward bending process*" dimana gejala politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

Kata kunci: Politik Islam, Arab spring, Demokrasi

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

**MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

Kata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

DDC: 352.14

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE
STUDIES IN THREE PROVINCES IN
INDONESIA***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148

Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to technical constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involved, the greater

the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.

Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady

***SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF
INDONESIAN WOMEN PATH
TO LOCAL POLITICS***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166

This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.

Keywords: socio-economic condition, university, internet, female local leader.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191

The present article discuss about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major government tourist projects. This group of politicians and enterprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.

Keywords: Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

VILLAGE AUTONOMY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211

The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.

Keywords: village autonomy, effectiveness, village fund

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND LOCAL CONNECTION

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225

After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation

between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

Keywords: decentralization, local autonomy, local government, public services.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality polities in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

Keywords: Party, Islamic Party, Democracy, Election

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

Keywords: Political Islam, Arab Spring, Democracy

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

Keywords: village, decentralization, autonomy, institutional.

KONTEKS SOSIAL EKONOMI KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA DAERAH ¹

SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF INDONESIAN WOMEN PATH TO LOCAL POLITICS

Kurniawati Hastuti Dewi

Pusat Penelitian Politik,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

Ahmad Helmy Fuady

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
Email: elhelmy@yahoo.com

Diterima: 5 September 2016; direvisi: 21 Oktober 2016; disetujui: 29 Desember 2016

Abstract

This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.

Keywords: *socio-economic condition, university, internet, female local leader.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Kata Kunci: *sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.*

¹ Draft awal tulisan ini berjudul “*Socio Economic Context of Indonesian Women Path to Local Politics*” telah dipresentasikan dalam konferensi internasional “The 9th International Indonesia Forum Conference: in search of Key Drivers of Indonesian Empowerment”, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 24 August 2016.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya disebut Pilkada langsung) merupakan salah satu capaian penting demokratisasi Indonesia pasca lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan Indonesia. Pilkada langsung dapat dilihat sebagai sebuah terobosan dalam penguatan demokrasi, terutama partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di tingkat lokal. Sejak 2005, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase. *Fase pertama* adalah tahun 2005-2010, sebagai fase awal implementasi Pilkada langsung yang merupakan amanat Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; *fase kedua* adalah tahun 2010-2015 sebagai fase lanjutan pelaksanaan Pilkada langsung; dan *fase ketiga* adalah sejak tahun 2015 sebagai fase Pilkada langsung serentak sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang sekarang diganti dengan UU No.10/2016.²

Mekanisme Pilkada langsung telah membuka peluang partisipasi politik yang lebih besar pada berbagai elemen masyarakat, termasuk kaum perempuan untuk ikut mewarnai dan menentukan arah demokrasi lokal. Sejak dimulainya Pilkada

²Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2015 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah memilih ‘paket’ calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” Selain itu, pasal 3 ayat (1) UU No. 8/2015 juga menyebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jadi, ke depan Pilkada langsung berupa pemilihan kepala daerah dan wakilnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat dilaksanakan serentak waktunya. Pasal 201 UU No. 8/2015 menjelaskan bahwa terdapat tujuh gelombang Pilkada langsung serentak yaitu: gelombang pertama, pada Desember 2015 (telah selesai dilaksanakan), gelombang kedua pada tahun 2017, gelombang ketiga pada tahun 2018, gelombang keempat pada tahun 2020, gelombang kelima pada tahun 2022, gelombang keenam pada tahun 2023, dan terakhir gelombang ketujuh pada tahun 2027, informasi dalam <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1627.pdf>, (diakses pada 18 Agustus 2016).

langsung di berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 2005, jumlah perempuan yang menjadi kandidat dan atau terpilih sebagai kepala daerah meningkat cukup signifikan. Pada Pilkada langsung selama dua periode (2005-2010) dan (2010-2014), terdapat 26 perempuan terpilih sebagai kepala daerah (18 di Pulau Jawa--Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat--, dan 8 perempuan di luar Pulau Jawa).³ Sementara itu, pada Pilkada langsung serentak tanggal 9 Desember 2015, terpilih 24 perempuan yang menjadi bupati/walikota.

Tulisan ini terutama difokuskan pada persoalan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada langsung serentak gelombang pertama yang telah dilakukan pada 9 Desember 2015 yang lalu. Pada 9 Desember 2015, terdapat 269 daerah (9 provinsi, 36 kotamadya, dan 224 kabupaten) yang telah melaksanakan Pilkada langsung serentak. Sejauh ini evaluasi maupun analisis mengenai Pilkada langsung serentak tahun 2015, banyak menyoroti hal-hal berupa: (i) persoalan efisiensi dan efektifitas anggaran, pemutakhiran data pemilih, persoalan calon tunggal dalam Pilkada, sengketa Pilkada;⁴ (ii) rendahnya partisipasi masyarakat, politisasi birokrasi, dan persoalan politik uang;⁵ (iii) kurang semaraknya Pilkada langsung serentak sebagai dampak pembatasan kampanye yang diatur oleh KPUD, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu.⁶

Beberapa tulisan telah menyoroti partisipasi perempuan yang kemudian terpilih menjadi kepala daerah. Perludem misalnya membuat catatan potret perempuan dalam Pilkada langsung serentak: dari 264 daerah, hanya 45 daerah

³ Kurniawati Hastuti Dewi, “Profiles, Statuses and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections,” *Indonesian Feminist Journal*, vol.3, no. 1 (August 2015): hlm.47-52.

⁴ Lihat Perludem, “Evaluasi Pilkada Serentak 2015,” *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, no. 8 (April 2016).

⁵ Lihat Dewan Perwakilan Daerah-Republik Indonesia, “DPD evaluasi Pilkada serentak 2015”, 18 Desember 2015, <http://dpdri.merdeka.com/berita/dpd-evaluasi-pilkada-serentak-2015-151218o.html> (diakses 18 Agustus 2016).

⁶ Lihat Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), “Pilkada Serentak Telah Usai, Ini Evaluasi Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII”, 18 Januari 2016, dalam <http://www.berita9online.com/nasional/pilkada-serentak-telah-usai-ini-evaluasi-pusat-studi-hukum-konstitusi-fh-iii/>, (diakses pada 18 Agustus 2016).

yang melahirkan perempuan pemimpin di mana 24 orang perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah, 22 orang perempuan yang terpilih sebagai wakil kepala daerah, masih dominannya petahana, serta masih rendahnya komitmen perempuan kepala daerah terhadap persoalan perempuan.⁷ Yayasan SATUNAMA Yogyakarta memberikan catatan yang lebih optimistik misalnya, perempuan tidak mengalami stagnasi politik karena separuh dari perempuan yang saat ini menjadi kepala daerah terlebih dahulu menjadi wakil kepala daerah, 53 % dari keseluruhan kandidat perempuan memiliki perspektif gender, dan mengemukakan temuan yang hampir sama dengan Perludem bahwa sebagian besar perempuan kepala daerah terpilih adalah dari petahana, mantan anggota legislatif, pengusaha, dan birokrat.⁸

Berbeda dengan tulisan ataupun analisis tersebut di atas, tulisan ini menganalisis kemungkinan pola hubungan (korelasi) antara kondisi sosial ekonomi di daerah dengan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada langsung serentak 2015. Kondisi sosial ekonomi dalam tulisan ini merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan (indeks gini) di kabupaten/kota. Selain itu, tulisan ini juga melihat kemungkinan persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet yang menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Terdiri dari tiga bagian, setelah pendahuluan, bagian kedua merupakan pembahasan, yang terdiri dari dua sub-judul yaitu review literatur yang menjelaskan kerangka pikir perempuan dan rekrutmen politik, diikuti dengan pemberdayaan perempuan, pembangunan ekonomi dan demokrasi. Disusul dengan sub-judul data dan analisis yang menjelaskan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang memaparkan sejauhmana kontribusi

IPM, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemunculan kandidat perempuan dan kemenangannya dalam Pilkada langsung serentak 2015 yang lalu. Bagian ini juga menampilkan hasil pengujian terhadap variabel lain yaitu jumlah universitas dan jumlah orang yang mengakses internet di daerah yang bersangkutan untuk menjelaskan perbedaan jumlah kandidat yang begitu besar di Jawa, dibandingkan dengan daerah lain. Bagian ketiga penutup yang merangkum temuan, analisis dan dua poin penting yang digarisbawahi dalam tulisan ini.

Rekrutmen Politik, Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi

Mendiskusikan tentang kiprah perempuan kepala daerah, nampaknya dapat juga didekati dari literatur tentang rekrutmen politik. Pada dasarnya teori perempuan dan rekrutmen politik seperti yang dikemukakan oleh Pippa Norris (1995:21) menggariskan bahwa rekrutmen anggota legislatif pada dasarnya meliputi tiga level yaitu: *pertama*, “*the systematic factor*” meliputi konteks rekrutmen seperti “*legal, electoral, and party system*”; *kedua*, konteks dalam partai politik tertentu seperti organisasi partai, aturan, dan ideologi; *ketiga*, faktor yang langsung mempengaruhi rekrutmen kandidat individual seperti: (a) sumber daya dan motivasi dari kandidat, dan (b) perilaku dari para elit penyeleksi (*gatekeepers*).⁹ Dalam buku yang lain, Pippa Norris (1997:1) memakai kata ‘*supply*’ dan ‘*demand*’ untuk menjelaskan faktor ketiga yang disebutkan di atas, di mana ‘*supply*’ berarti suplai kandidat yang ingin maju ke dalam posisi politik dengan melihat khususnya motivasi mereka dan sumber daya politiknya; sementara ‘*demand*’ merujuk pada keinginan dari ‘*gatekeepers*’ yaitu pemilih, anggota partai politik, pemimpin partai politik, pemimpin politik, penyokong dana, yang menyeleksi beberapa (kandidat) dari sejumlah besar calon potensial.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan

⁷ Perludem, “*Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Properempuan*”, Jakarta, 20 Desember 2015.

⁸ Yayasan SATUNAMA, “Perempuan di Pilkada Serentak 2015: Perspektif dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada,” Yayasan SATUNAMA, Yogyakarta, 2015.

⁹ Pippa Norris and Joni Lovenduski, *Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament* (Great Britain: Cambridge University Press, 1995), hlm. 21.

¹⁰ Pippa Norris, “Introduction: Theories of Recruitment,” dalam Pippa Norris (ed). *Passage to Power: Legislative Recruitment in*

Noris di atas, sebenarnya teori perempuan dan rekrutment politik untuk menganalisis kompetisi pemilihan anggota perlemen perempuan dalam lembaga legislatif fokus pada 'supply' dan 'demand'. Dalam konteks ini, posisi perempuan anggota parlemen adalah seorang wakil rakyat dalam sebuah lembaga perwakilan yang tidak bisa berdiri sendiri, cenderung kolektif, dan bukan pemimpin tertinggi sebuah daerah.

Sementara itu, tulisan ini mengkaji perempuan calon kepala daerah yang kemudian berhasil memenangkan Pilkada langsung sebagai pucuk pimpinan tertinggi eksekutif daerah. Oleh karena itu, dalam konteks ini harus dimengerti bahwa melandaskan diri pada sebuah teori yang sudah mapan sekalipun seperti teori perempuan dan rekrutmen politik, yang berasal dari konteks legislatif yang fokus pada aspek 'supply' dan 'demand' saja tidak cukup mampu menerangkan bekerjanya faktor di luar kedua hal tersebut, untuk persoalan perempuan sebagai calon pemimpin daerah. Diskusi mengenai perempuan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di sebuah daerah menyangkut dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan perempuan sebagai anggota parlemen. Apalagi dalam sebuah masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sebagaimana catatan aktifis perempuan Muslim (almarhumah) Lili Zakiyah Munir, (2002) bahwa terdapat persepsi umum yang berkembang bahwa Islam sebagai sumber diskriminasi dan penindasan perempuan, sehingga tidak ramah terhadap perempuan,¹¹ serta adanya beberapa kasus penolakan terhadap perempuan sebagai calon pemimpin kepala daerah.¹² Oleh karena itulah, tulisan ini memerlukan bangunan teori lain untuk membangun kerangka tulisan untuk memahami apakah terdapat konteks sosial ekonomi masyarakat tertentu

Advanced Democracies (Great Britain: Cambridge University Press, 1997), hlm.1

¹¹ Lili Zakiyah Munir, "Islam, Gender and Equal Rights for Women," *The Jakarta Post*, December 10, (2002), hlm.6.

¹² Lihat studi mendalam mengenai dinamika dan penolakan terhadap perempuan Muslim sebagai calon kepala daerah di Kebumen, Pekalongan dan Banyuwangi sebagaimana ditulis Kurniawati Hastuti Dewi, *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia* (Singapore: NUS Press and Kyoto University Press, 2015).

yang berkorelasi dengan kemunculan dan kemenangan perempuan sebagai pemimpin tertinggi sebuah daerah (kepala daerah) melalui kompetisi elektoral Pilkada langsung. Dalam konteks inilah, selanjutnya tulisan ini memakai bangunan teori pemberdayaan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat hal ini berupa konteks sosial ekonomi masyarakat yang melingkupi seorang perempuan politisi, yang kemungkinan berkorelasi terhadap kemunculan dan kemenangan perempuan sebagai kepala daerah. Berikutnya adalah eksplorasi teori pemberdayaan, yang nantinya akan berujung pada tiga asumsi dasar dalam tulisan ini.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dapat didekati dari istilah pemberdayaan ('empowerment'). Kata 'pemberdayaan' atau 'empowerment' telah banyak dipakai paling tidak sejak tahun 1960an dalam dokumen-dokumen kebijakan pembangunan negara-negara Utara dan Selatan. Amartya Sen (1999) dalam "*Development as Freedom*" menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak saja dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi semata, tetapi dilihat sejauh mana masyarakat memiliki banyak pilihan dari berbagai kesempatan; Sen memperkenalkan konsep 'kebebasan manusia' (*human freedom*) dalam lima hal yaitu pemberdayaan ekonomi, kebebasan politik, kesempatan sosial, keamanan dan transparansi sebagai prinsip dan tujuan akhir dari pembangunan, sementara ukuran-ukuran ekonomi adalah cara untuk mencapainya.¹³

Kemudian, istilah pembangunan dan pemberdayaan semakin sering dipakai dan muncul dalam dokumen-dokumen resmi lembaga-lembaga internasional. Sebagai contoh, Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995 (*The Human Development Report 1995*) menekankan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebagai berikut:

"Empowerment. Development must be by people, not only for them. People must participate fully in the decision and processes that shape their lives. (UN, 1995 b: 12) but at the same time promotes a rather instrumentalist view of

¹³ Lihat Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999). Lihat juga review buku Amartya Sen oleh Siri Terjesen, "A. Sen's 'Development as freedom'", January 2004, dalam <https://www.researchgate.net/publication/27466009>, (diakses pada 16 Agustus 2016).

empowerment; Investing in women's capabilities and empowering them to exercise their choices is not only valuable in itself but also is the surest way to contribute to economic growth and overall development (UN, 1995 b: iii)."¹⁴

Sementara itu, OXFAM menyatakan:

"Empowerment involves challenging the forms of oppression which compel millions of people to play a part in their society on terms which are inequitable, or in way which deny their human rights (Oxfam, 1995)."¹⁵

Jika dicermati, catatan Laporan Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1995 menekankan pemberdayaan sebagai partisipasi sepenuhnya dari warga masyarakat dalam proses dan pembuatan keputusan, serta meningkatkan kapasitas perempuan agar dapat melakukan berbagai inisiatif dan pilihan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pemberdayaan menurut OXFAM menekankan pada upaya menentang segala bentuk-bentuk penindasan hak-hak dasar, pengingkaran terhadap hak asasi manusia atau diskriminasi yang membelenggu masyarakat. Bagaimana jika kata pemberdayaan dikaitkan dengan persoalan perempuan?

Konsep mengenai pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*), mulai muncul dalam diskursus para feminis di dunia ketiga sejak tahun 1980an, seiring dengan kritik mereka terhadap konsep-konsep modernisasi dan pembangunan. Dimulai dari Ester Boserup yang mengkritisi pendekatan kesejahteraan sebelum tahun 1970-an. Dalam bukunya *Woman's Role in Economic Development* (1970) Boserup menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan modernisasi di pedesaan di negara-negara dunia ketiga (Asia, Afrika, Latin Amerika) tidak serta merta memberikan keuntungan dan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki, dimana perempuan banyak ditinggalkan dalam proses produksi digantikan dengan mesin, menerima upah yang sangat rendah

¹⁴ Sebagaimana dikutip dari Zoe Oxaal and Sally Baden, "Gender and Empowerment: Definitions, Approaches, and Implications for Policy," *BRIDGE Development – Gender Report*, no. 40 (October 1997), hlm. 4.

¹⁵ Ibid.

di sektor non-pertanian di daerah perkotaan, dan bahkan tidak dihargai pekerjaan mereka di pedesaan.¹⁶ Kemudian, kritik para feminis terhadap pembangunan ekonomi semacam itu diterjemahkan dalam upaya mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan melalui pendekatan *Women in Development (WID)* sejak tahun 1970an. Pengadopsian WID ditandai pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB pertama tentang Perempuan di Mexico tahun 1975, yang memperkenalkan term *Women in Development (WID)* untuk memastikan integrasi perempuan dalam pembangunan.

Namun demikian, Caroline Mosser (1991) mencatat bahwa pendekatan anti kemiskinan (*anti-poverty approach*) yang dipakai dalam WID untuk mencapai kesetaraan gender, lebih menekankan pada upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki karena dipercaya bahwa sumber ketidakadilan adalah kemiskinan, dan bukan sub-ordinasi.¹⁷ Menurut Geeta Chowdhry (1995) pendekatan anti kemiskinan dalam WID lebih difokuskan pada peran reproduksi perempuan, untuk perempuan pedesaan di dunia ketiga yang lekat dengan peran dan posisi konvensional perempuan sebagai istri atau ibu di rumah.¹⁸ Jadi, WID justru tidak mengintegrasikan perempuan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi malah meminggirkan perempuan.

Maka, melihat kecenderungan ini, para feminis di negara-negara dunia ketiga di Selatan (Global South --Asia, Afrika, Latin Amerika--) yang tergabung dalam *Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)* menyerukan agar WID diganti dengan *Gender and*

¹⁶ Lihat Ester Boserup, *Woman's Role in Economic Development* (Great Britain: George Allen and Unwin, 1970); baca juga Barbara Rogers, *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies* (London and New York: Routledge, 1980); Irene Tinker (ed.), *Persistent Inequalities: Women and World Development* (New York: Oxford University Press, 1990).

¹⁷ Caroline Mosser, "Gender Planning in the third World: Meeting Practical and Strategic Needs", dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations* (Suffolk: Open University Press, 1991), hlm. 101.

¹⁸ Geeta Chowdhry, "Engendering Development: Women in Development (WID) in International Development Regimes", dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.), *Feminism/Postmodernism/Development* (London and New York: Routledge, 1995), hlm 32.

Development (GAD)¹⁹ untuk mengintegrasikan kepentingan perempuan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun ternyata pendekatan anti-kemiskinan masih tetap digunakan. GAD berfokus pada hubungan politik atau relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki upaya untuk meningkatkan kuasa sosial politik perempuan dengan membenahi ketimpangan relasi tersebut.²⁰

Dalam perkembangannya sejak tahun 1980an, lembaga-lembaga donor internasional menggunakan kata ‘gender dan pembangunan’ termasuk kemudian merebak dalam term pemberdayaan perempuan (*women’s empowerment*) menggambarkan spirit yang lebih politis untuk melakukan transformasi, menentang struktur patriarki yang membelenggu peran dan posisi perempuan di negara-negara dunia ketiga.²¹ Dalam bahasa Srilatha Batliwala (2007) ‘*women’s empowerment*’ adalah sebuah proses sosial politik di mana pintu pembuka dalam pemberdayaan adalah perpindahan penguasaan sosial, ekonomi, politik di antara dan antara individu maupun kelompok sosial.²² Salah satu manifestasi konkrit adopsi pemberdayaan perempuan adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Perempuan di Nairobi, Kenya tahun 1985. Konferensi itu menjadi momen penyebaran gagasan dan pendekatan GAD,²³ selain rekomendasi “*the Nairobi Forward Looking Strategy*” untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.²⁴

¹⁹ DAWN adalah forum kerja sama dan komunikasi antara perempuan di negara-negara dunia yang menyadari bahwa WID justru meminggirkan perempuan. Lihat DAWN, “Rethinking Social Development: DAWN’s Vision,” *World Development* 23, no.11(1996).

²⁰ Kathryn Robinson, “Indonesian Women’s Rights, International Feminism and Democratic Change,” *Communal/Plural* 6, no.2 (1998): 205-223, hlm 212.

²¹ Srilatha Batliwala, “Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account”, *Development in Practice*, vol. 17, no. 4/5 (August 2007): 557-565, hlm.558

²² *Ibid.*, hlm. 559.

²³ Kate Young, “Gender and Development” dalam Nalini Visvanathan, and others, (eds), *The Women, Gender and Development Reader*; (London and New Jersey: Zed Books, 2000).

²⁴ Sjamsiah Achmad, “Perempuan Dalam Politik: Kampanye 50-50 Asia Pasifik 2005, Indonesia Kapan”, paper dipresentasikan

Dalam kaca mata GAD, upaya mengintegrasikan gender dalam kebijakan pembangunan dilakukan dengan ‘*mainstreaming*’ (pengarusutamaan) yakni upaya menyeluruh, lintas kebijakan, lintas tingkat pemerintahan, dan yang terpenting menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra aktif dalam proses tersebut.²⁵

Dalam perkembangan kekinian, kaum feminis khawatir dengan penggunaan istilah ‘pemberdayaan perempuan’ yang dalam praktiknya seringkali sekedar dimaknai sebagai upaya memobilisasi perempuan (umumnya) kelas bawah melalui program-program swakarsa untuk meningkatkan taraf ekonomi, partisipasi, tetapi tanpa memberikan kuasa untuk menentang narasi dominan dari pembangunan atau merumuskan jalan alternatif.²⁶ Menurut Rowland (1997:14) pandangan feminis mengenai ‘pemberdayaan’ tidak sekedar merujuk pada partisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi harus meliputi proses yang menyebabkan seseorang mampu mencapai kesadaran diri untuk dapat membuat keputusan; pemberdayaan harus meliputi dimensi ‘*power to*’ yaitu untuk melakukan kewenangan pengambilan keputusan untuk mengatasi persoalan, serta dimensi ‘*power within*’²⁷ dimana seseorang memiliki rasa percaya diri, kesadaran diri dan ketegasan diri.²⁸ Dalam pandangan feminis, sebagaimana ditegaskan Rowland, pemberdayaan meliputi tiga dimensi yaitu: pertama, ‘*personal*’ dimana seseorang mampu membangun rasa percaya diri, kapasitas, dan melepaskan diri dari penindasan dari dalam; kedua, ‘*relational*’ yaitu kemampuan untuk negosiasi atau mempengaruhi hubungan atau keputusan didalamnya; ketiga, ‘*collective*’ di mana seseorang dapat bekerja bersama

di Jakarta, 13 April 2001, Jakarta, hlm. 1.

²⁵ Kurniawati Hastuti Dewi, “Menjenderkan Pemerintahan Daerah”, *KOMPAS*, 15 Februari 2005.

²⁶ Elliot (2008) sebagaimana dikutip dari Manisha Desai, “Hope in Hard Times: Women’s Empowerment and Human development”, United Nations Development Programme, Human Development Research Paper 2010/14, July 2010, hlm. 4.

²⁷ Elaborasi mengenai ‘*power to*’ dan ‘*power within*’ diambil dari Zoe Oxaal and Sally Baden, “Gender and Empowerment: Definitions, Approaches, and Implications for Policy,” hlm 1.

²⁸ Jo Rowlands, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras* (UK and Ireland: Oxfam, 1997), hlm 14.

untuk mencapai dampak yang lebih optimal seperti upaya bersama dalam struktur politik menekankan kerja sama dan bukan kompetisi.²⁹

Tidak jauh berbeda, catatan Naila Kabeer (1999) juga menengahkan tiga dimensi pemberdayaan (perempuan), yaitu: pertama, ‘resources’ (*pre-condition*) meliputi tidak hanya sumber daya material tetapi juga sumber daya manusia, jaringan hubungan sosial dalam keluarga, pasar, masyarakat; kedua, ‘agency’ (*process*) sebagai kemampuan mendefinisikan tujuan dan mencapainya yang dapat berupa kemampuan melakukan negosiasi, tawar-menawar dalam sebuah keadaan atau pengambilan keputusan, memanipulasi atau memainkan, yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama; ketiga, ‘achievements’ (*outcomes*).³⁰ Kabeer merumuskan bahwa pemberdayaan perempuan (*women’s empowerment*) adalah proses dimana seseorang (perempuan) yang semula tidak memperoleh kesempatan melakukan pilihan strategis dalam hidupnya, kemudian mampu menguasai kemampuan tersebut.³¹

Kajian tentang kemunculan perempuan Indonesia dalam organisasi kemasyarakatan maupun politik di Indonesia telah banyak mengangkat aspek *agency*. Beberapa kajian tentang *agency* perempuan misalnya yang dilakukan oleh Safira Machrusah (2005), Susan Blackburn, Bianca J Smith, Siti Syamsiyatun (2008), Kurniawati Hastuti Dewi (2008) dan (2015), Eva F. Amrullah (2011), dan tim Gender dan Politik P2PLIPI (2016). Dalam penelitiannya Machrusah (2005) melihat bagaimana Muslimat Nahdlatul Ulama, sebuah badan otonom organisasi Islam tradisional, menegosiasikan kesetaraan gender dengan organisasi induknya, Nahdlatul Ulama.³² Blackburn, Smith dan Syamsiyatun (2008) menengahkan *agency* perempuan Muslim dalam menegosiasikan nilai-nilai dan

praktik Islam dalam berbagai bidang misalnya polygami, pemakaian jilbab, kegiatan filantropi, sebagai *nyai (istri kyai)*, dan pembentukan identitas baru perempuan Muslim.³³ Sementara itu Dewi (2008) melihat strategi perempuan di ‘Aisyiyah dalam menegosiasikan persoalan kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah.³⁴ Dalam level politik praktis, Dewi (2015) menganalisis *agency* tiga perempuan yang memenangkan kompetisi Pilkada langsung di daerah yang berbasis Islam di Jawa, yaitu Ratna Ani Lestari di Banyuwangi (2005), Rustriningsih di Kebumen (2005), dan Siti Qomariyah di Pekalongan (2006). Studi tersebut menemukan bahwa ketiga perempuan tersebut mampu menggunakan dan memainkan ide-ide atau norma-norma mengenai kesalehan dalam Islam (*Islamic piety*) seperti memakai kerudung dikombinasikan dengan identitas gender mereka sebagai seorang “perempuan Muslim Jawa”.³⁵ Amrullah (2011) meneliti perempuan Muslim kelas menengah atas yang bergabung aktif dalam Jamaah Tabligh di Jakarta; menemukan bahwa partisipasi aktif para perempuan Muslim tersebut termasuk dalam menyebarkan dan merekrut anggota baru menunjukkan sisi *agency*³⁶ dari perempuan, oleh karena itu tidak tepat menilai bahwa bergabungnya mereka ke Jamaah Tabligh sebagai sebuah ketertindasan.³⁷ Sementara itu, tim peneliti Gender dan Politik P2P-LIPI

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁰ Naila Kabeer, “Resource, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment”, *Development and Change*, vol. 30 (1999): 435-464, hlm. 437-438.

³¹ *Ibid.*

³² Safira Machrusah, “Muslimat Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia” (Master thesis, the Australian National University, 2005).

³³ Susan Blackburn, Bianca J Smith, Siti Syamsiyatun, “Introduction”, dalam Susan Blackburn, Bianca J. Smith, Siti Syamsiyatun (eds), *Indonesian Islam in A New Era: How Women Negotiate Their Muslim Identities*, (Clayton: Monash University Press, 2008), hlm 3.

³⁴ Kurniawati Hastuti Dewi, “Perspectives Versus Practices: Women’s Leadership in Muhammadiyah”, *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, vol. 23/2, October 2008 : hlm.161-185

³⁵ Kurniawati Hastuti Dewi, *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*.

³⁶ Amrullah terinspirasi dan mengikuti pengertian ‘agency’ dari Saba Mahmood, “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agents: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival,” *Cultural Anthropology* 16, no. 2 (May 2001), hlm. 225; Saba Mahmood, *Politics of Piety: the Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005).

³⁷ Eva F. Amrullah, “Seeking Sancturay in ‘the age of disorder’: Women in Contemporary Tablighi Jama’at,” *Contemporary Islam* 5/2, (2011): hlm.135-160.

(2016) menunjukkan bagaimana Eka Wiryastuti dapat memainkan perannya dalam ‘mengolah, menegosiasikan, atau menyiasati agama Hindu Bali, budaya, adat istiadat sejak proses persiapan awal kemunculannya dan kemenangannya’ di Tabanan, Bali.³⁸ Kajian-kajian tersebut lebih banyak melihat bagaimana agensi yang diperankan para perempuan untuk muncul sebagai pemimpin politik. Belum ada kajian yang secara serius melihat bagaimana kemungkinan konteks sosial ekonomi yang menjadi pra-kondisi atau memfasilitasi kemunculan perempuan dalam politik lokal tersebut.

Sementara itu, Seymour Martin Lipset (1959) sejak lama mengungkapkan tentang perlunya melihat prasyarat sosial bagi perkembangan demokrasi. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang efektif berkorelasi positif dengan demokrasi.³⁹ Hal senada dinyatakan oleh Guillermo A. O’Donnell (2004), bahwa salah satu komponen penting bahkan sangat dasar dari demokrasi, yang selama ini kerap diabaikan, adalah manusia dalam hal ini warga negara; O’Donnell percaya ada hubungan erat antara demokrasi, pembangunan manusia (*Human Development*), dan hak asasi manusia (*Human Rights*).⁴⁰ Oleh karena itulah, untuk mengisi kekosongan yang ada dalam kajian tersebut, tulisan ini melihat bagaimana hubungan antara variabel sosial ekonomi dengan keberadaan perempuan pemimpin politik.

Aspek sosial ekonomi masyarakat dalam tulisan ini merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), prosentase kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Penggunaan IPM, didasari pemikiran bahwa ada hubungan erat antara demokrasi, pembangunan manusia

(*Human Development*), dan hak asasi manusia (*Human Rights*).⁴¹ Di Indonesia, IPM merupakan indeks komposit dari faktor kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (lama sekolah) dan standar hidup layak (besar pengeluaran). Diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990, IPM ini dapat menunjukkan kualitas pembangunan yang dinikmati oleh penduduk.

Tulisan ini didasari tiga asumsi yaitu: *pertama*, daerah yang memiliki prosentase kemiskinan yang rendah dianggap memiliki kelas menengah yang cukup banyak, sehingga cenderung mudah menerima adanya pemimpin perempuan. Asumsi *kedua* adalah, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indeks gini dianggap menunjukkan kesetaraan dalam suatu daerah; daerah dengan ketimpangan yang rendah diasumsikan memiliki pandangan yang lebih terbuka dalam menerima pemimpin perempuan. Variabel lain yang dilihat dalam tulisan ini terkait dengan arus informasi dan pengetahuan yang mendukung persebaran ide tentang kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik, yaitu jumlah perguruan tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki akses internet. Kedua variabel ini menjadi sarana penyebaran ide-ide baru, diskusi-diskusi mengenai perkembangan demokrasi, termasuk tentang perkembangan tafsir atas persoalan kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, asumsi *ketiga* tulisan ini adalah: bahwa eksposur yang lebih banyak terhadap ide dan perkembangan tentang demokrasi dan kesetaraan gender melalui perguruan tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki akses internet, diasumsikan akan memudahkan kemunculan kepemimpinan perempuan dalam politik.

Data dan Analisis

Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2015 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah memilih ‘paket’ calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada Pilkada langsung serentak 9 Desember 2015, terdapat 825 paket pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari 19 paket pasangan untuk posisi kepala daerah provinsi, 110 paket pasangan untuk posisi

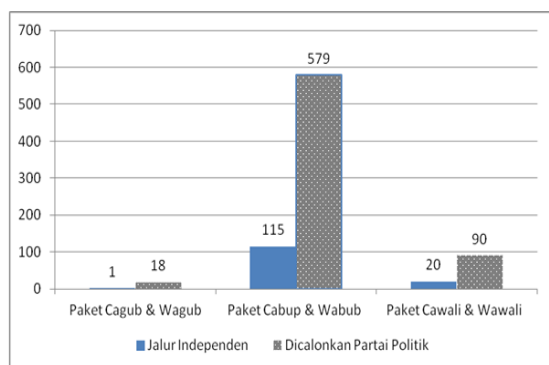
³⁸ Kurniawati Hastuti Dewi, ed., *Kebangkitan Perempuan Tabanan dalam Politik Lokal* (Tangerang: Mahara Publishing, 2016).

³⁹ Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” *The American Political Science Review*, vol. 53, no. 1 (Mar, 1959): hlm. 69-105.

⁴⁰ Guillermo O’Donnell, “Human Development, Human Rights, and Democracy,” dalam Guillermo O’Donnell, Jorge Vargas Cullell, Osvaldo M. Iazzetta (eds.), *The Quality of Democracy Theory and Applications*, (USA: University of Notre Dame Press, 2004), hlm. 9-10.

⁴¹ *Ibid.*

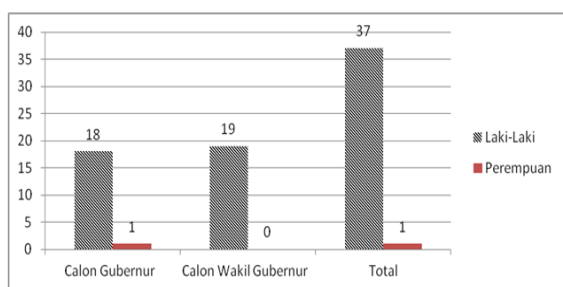
kepala daerah kota, dan 694 paket pasangan untuk posisi kepala daerah kabupaten.



Sumber: diolah oleh penulis dari data dasar di website KPU RI, <http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=Dashboard/paslon&tahap=3> (diakses pada 22 Oktober 2015)

Gambar 1. Grafik 1. Distribusi Pasangan Calon Kepala Daerah berdasarkan Pencalonan

Sebagaimana terlihat dari Grafik 1, terdapat 19 paket pasangan calon gubernur & wakil gubernur, di mana sebagian besar dicalonkan oleh partai politik. Demikian pula untuk paket pasangan calon bupati & wakil bupati, dan walikota & wakil walikota, sebagian besar juga dicalonkan oleh partai politik. Selanjutnya untuk melihat jumlah calon gubernur dan wakil gubernur atas dasar gender dapat disajikan dalam Grafik 2.

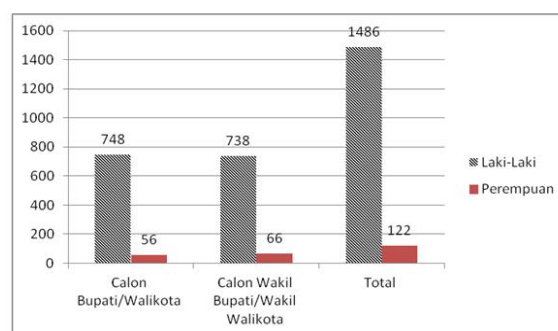


Sumber: diolah oleh penulis dari data dasar di website KPU RI <http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=Dashboard/paslon&tahap=3> (diakses pada 22 Oktober 2015)

Grafik 2. Jumlah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas dasar Gender

Grafik 2 menunjukkan hanya ada 1 perempuan dicalonkan sebagai calon gubernur,

tidak ada perempuan dicalonkan sebagai wakil gubernur. Maya Rumantir (anggota DPD RI) dicalonkan sebagai gubernur Sulawesi Utara oleh Gerindra dan Partai Demokrat. Sementara ada 18 laki-laki dicalonkan sebagai gubernur, dan 19 orang laki-laki dicalonkan sebagai wakil gubernur. Grafik ini menunjukkan betapa sulit dan sengitnya persaingan kedudukan seorang kepala daerah provinsi, sehingga semakin sedikit politisi perempuan yang mampu muncul dan masuk dalam bursa pencalonan posisi wakil gubernur dan sebagai calon gubernur. Selanjutnya untuk melihat di level kabupaten kota disajikan dalam Grafik 3.



Sumber: diolah oleh penulis dari data dasar di website KPU RI <http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=Dashboard/paslon&tahap=3> (diakses pada 16 Oktober 2015)

Grafik 3. Jumlah Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota atas dasar Gender

Berdasarkan Grafik 3 di atas, hanya ada 56 politisi perempuan sebagai calon bupati/walikota, dan 66 politisi perempuan sebagai calon wakil bupati/calon walikota. Dibandingkan dengan 748 politisi laki-laki pada posisi calon bupati/walikota, dan 738 politisi laki-laki pada posisi calon wakil bupati/wakil walikota. Grafik ini menggambarkan masih dominannya politisi laki-laki dalam pertarungan politik lokal level kabupaten/kota. Namun jika dilihat lebih jauh, grafik ini memberikan gambaran menarik bahwa level kabupaten/kota nampaknya menjadi wahana pertarungan politik yang relatif dinamis, lebih terbuka bagi para politisi perempuan untuk ikut berkiprah, dibandingkan di level provinsi. Jadi, level kabupaten/kota dapat dijadikan tidak saja sebagai tempat bertarung awal bagi seorang politisi perempuan, namun dapat menjadi media

pembelajaran untuk kemudian secara bertahap naik pada posisi level provinsi, seiring dengan pengalaman politik dan kinerjanya.

Dari Grafik 2 dan Grafik 3, itu dapat diketahui bahwa terdapat 57 perempuan yang dicalonkan sebagai kepala daerah yaitu 1 sebagai calon gubernur dan 56 sebagai calon bupati/walikota. Kemudian, tulisan ini fokus pada dari 56 daerah di mana terdapat perempuan sebagai calon bupati/walikota. Dari 56 daerah tersebut, terdapat 24 daerah di mana perempuan berhasil menang menjadi kepala daerah dalam Pilkada Langsung serentak 9 Desember 2015.⁴²

Tulisan ini terutama menggunakan data Pilkada langsung serentak 2015 dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data sosial ekonomi dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang didapat dari laman KPU adalah data tentang kandidat kepala daerah dan jumlah kabupaten/kota peserta Pilkada langsung tahun 2015. Sementara data sosial ekonomi yang berupa proporsi penduduk perempuan dibanding laki-laki, IPM, proporsi penduduk miskin, indeks gini,⁴³ jumlah perguruan tinggi, dan proporsi pengguna internet didapat dari laman BPS pusat dan provinsi. Data sosial ekonomi yang digunakan adalah data tahun 2014 karena

Tabel 1. Data Pilkada dan Indikator Sosial Ekonomi Terpilih

	Kandidat Perempuan	Kabupaten/ Kota Peserta pemilu	Perempuan /Laki-laki	IPM	% Miskin	GINI	Perguruan Tinggi	% Pengguna Internet
Sumatera Utara	3	23	1.005	68.87	10.35	0.34	300	13.09
Sumatera Barat	0	19	1.013	69.36	7.09	0.34	131	15.61
Riau	0	9	0.947	70.33	7.98	0.36	99	15.88
Jambi	2	11	0.959	68.24	8.41	0.36	61	12.85
Sumatera Selatan	2	7	0.968	66.75	13.54	0.36	133	12.84
Bengkulu	3	10	0.961	68.06	17.32	0.38	24	12.04
Lampung	1	8	0.948	66.42	14.29	0.38	101	8.37
Kep. Bangka Belitung	1	4	0.928	68.27	5.22	0.28	15	12.05
Kep. Riau	0	7	0.955	73.4	5.98	0.36	34	29.00
Jawa Barat	3	8	0.971	68.8	8.95	0.41	511	16.85
Jawa Tengah	7	21	1.016	68.78	13.27	0.38	320	15.04
Di Yogyakarta	3	3	1.025	76.81	13.34	0.43	143	24.49
Jawa Timur	5	19	1.027	68.14	12.05	0.42	513	14.05
Banten	4	4	0.960	69.89	5.42	0.4	142	16.96
Bali	2	6	0.987	72.48	4.25	0.38	65	18.08
Nusa Tenggara Barat	1	7	1.063	64.31	16.48	0.37	78	7.90
Nusa Tenggara Timur	0	9	1.018	62.26	22.19	0.34	48	5.52
Kalimantan Barat	1	7	0.962	64.89	7.87	0.33	54	9.96
Kalimantan Tengah	0	14	0.916	67.77	5.66	0.33	29	12.23
Kalimantan Selatan	0	13	0.976	67.63	4.85	0.35	60	16.11
Kalimantan Timur	3	9	0.903	73.82	6.11	0.32	75	25.52
Kalimantan Utara	2	5	0.903	68.64	6.23	0.29	1	25.52
Sulawesi Utara	6	15	0.960	69.96	8.34	0.37	49	14.94
Sulawesi Tengah	1	13	0.955	66.43	14.45	0.37	40	9.89
Sulawesi Selatan	3	11	1.049	68.49	9.4	0.42	240	13.25
Sulawesi Tenggara	0	7	0.991	68.07	12.88	0.4	47	10.19
Gorontalo	0	3	0.996	65.17	17.72	0.42	13	11.22
Sulawesi Barat	0	4	0.995	62.24	11.74	0.36	18	8.43
Maluku	1	4	0.982	66.74	19.18	0.34	31	10.95
Maluku Utara	0	8	0.960	65.18	6.33	0.28	20	4.98
Papua Barat	0	9	0.898	61.28	25.43	0.44	22	5.75
Papua	2	11	0.893	56.75	28.54	0.42	44	10.26

Sumber: Diolah dari laman KPU dan BPS

⁴² Mengacu pada data Perludem, Perludem, “*Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Properempuan*”, Jakarta, 20 Desember 2015.

⁴³ Mengacu pada ‘koefisien gini’ Badan Pusat Statistik-RI, untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=22> (diakses pada 25 Agustus 2016)

dianggap sebagai tahun dasar pengambilan kebijakan politik dalam Pilkada langsung 2015. Karena di tahun 2015 tidak ada kabupaten/kota dari DI Aceh dan DKI Jakarta yang mengikuti Pilkada langsung, maka kedua provinsi tersebut tidak disertakan dalam analisis.

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara keberadaan perempuan calon bupati/walikota dengan variable sosial ekonomi daerah yang berupa proporsi penduduk perempuan dibanding laki-laki, IPM, proporsi penduduk miskin, indeks gini, distribusi perguruan tinggi, dan proporsi pengguna internet di 31 provinsi yang memiliki kabupaten/kota peserta Pilkada langsung 2015. Dalam analisis ini, variabel keberadaan perempuan bupati/walikota merupakan jumlah perempuan calon bupati/walikota yang ada di suatu provinsi dibagi dengan jumlah kabupaten/kota peserta Pilkada langsung 2015 yang ada di provinsi yang bersangkutan. Variabel sosial ekonomi yang dipakai mengikuti data yang ada dari BPS. Khusus variabel distribusi perguruan tinggi merupakan data jumlah perguruan tinggi yang ada di suatu provinsi dibagi dengan jumlah total perguruan tinggi di Indonesia. Hasil analisis korelasi ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Korelasi

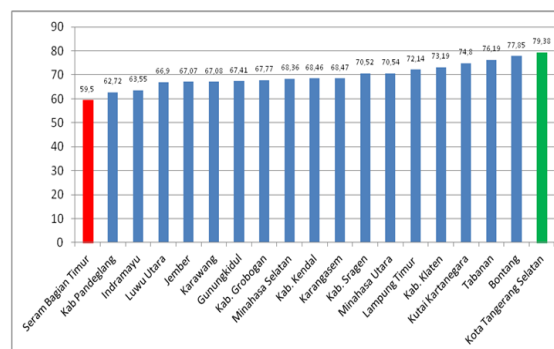
Kandidat Perempuan	
Perempuan/Laki-laki	0.07388
IPM	0.48970
Kemiskinan	-0.15418
Gini	0.25182
Perguruan Tinggi	0.26106
% Pengguna Internet	0.46157

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada variabel sosial ekonomi yang memiliki hubungan yang kuat dengan variabel keberadaan perempuan calon bupati/walikota. Hanya variabel IPM dan proporsi pengguna internet yang memiliki hubungan level sedang atau menengah dengan keberadaan perempuan calon bupati/walikota, dengan koefisien korelasi sebesar 0,48 dan 0,46. Indeks gini dan distribusi perguruan tinggi

hanya menunjukkan hubungan yang rendah dengan keberadaan perempuan calon bupati/walikota, dengan koefisien korelasi sebesar 0,25 dan 0,26. Sementara itu, hubungan keberadaan perempuan calon bupati/walikota dengan variabel proporsi penduduk perempuan dibanding laki-laki dan variabel kemiskinan sangat rendah (0,07 dan -0,15).

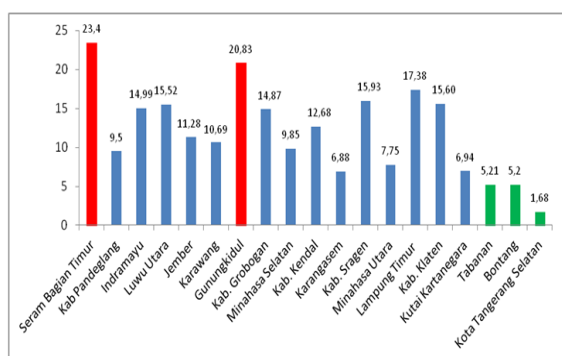
Lebih jauh, Grafik 4 di bawah ini, menunjukkan bahwa calon perempuan bupati/walikota dapat muncul dan menang di daerah dengan IPM rendah maupun IPM tinggi. Hal ini terlihat misalnya di Boven Digoel yang hanya memiliki nilai IPM sebesar 51,9 atau di Kota Tangerang Selatan dengan nilai IPM sebesar 79,38. Ini sekaligus menjawab asumsi pertama, bahwa daerah yang memiliki prosentase kemiskinan yang rendah dianggap memiliki kelas menengah yang cukup banyak, sehingga cenderung mudah menerima adanya pemimpin perempuan. Namun ternyata, analisis korelasi menunjukkan tidak adanya hubungan yang kuat antara keberadaan perempuan calon bupati/walikota dengan variabel sosial ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa perempuan pemimpin politik dapat muncul di daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam.



Sumber: data BPS diolah oleh penulis.

Grafik 4. IPM di beberapa Kabupaten/Kota yang dimenangkan Calon Perempuan

Sementara itu, Grafik 5 selanjutnya, menunjukkan variasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota yang dimenangkan oleh perempuan calon bupati/walikota pada Pilkada langsung 2015. Kandidat perempuan bisa muncul dan menang di daerah dengan prosentase kemiskinan yang sangat rendah, seperti di Kota Tangerang Selatan (1,68%), Bontang (5,2%) dan Tabanan (5,2%) atau di daerah dengan penduduk yang prosentase kemiskinannya sangat tinggi seperti di Seram Bagian Timur (23,4%) maupun Gunung Kidul (20,83%). Hal serupa juga terlihat pada tingkat kesenjangan sosial yang tercermin pada nilai IPM. Kandidat bupati/walikota perempuan ternyata dapat muncul di daerah dengan tingkat kesenjangan tinggi seperti Tabanan (IPM=0,36), maupun daerah dengan tingkat kesenjangan rendah seperti Kutai Timur (IPM=0,20). Hal ini untuk menjawab asumsi kedua tulisan ini bahwa ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indeks gini dianggap menunjukkan kesetaraan dalam suatu daerah; daerah dengan ketimpangan yang rendah diasumsikan memiliki pandangan yang lebih terbuka dalam menerima pemimpin perempuan. Ternyata, menang tidaknya kandidat perempuan juga tidak berhubungan dengan tingkat kesenjangan di daerah tersebut. Mereka dapat menang di daerah dengan kesenjangan rendah seperti di Bontang, Jember atau Kutai Kertanegara, maupun di daerah dengan tingkat kesenjangan tinggi seperti di Sragen, Klaten atau Grobogan.



Sumber: Data BPS diolah oleh penulis.

Grafik 5. Proporsi Penduduk Miskin di Kabupaten/ Kota yang dimenangkan Calon Perempuan

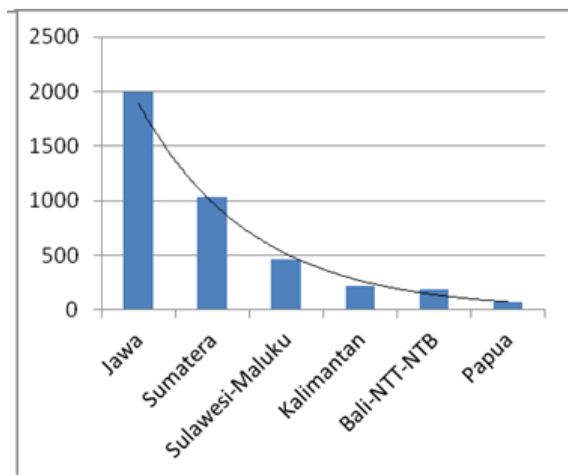
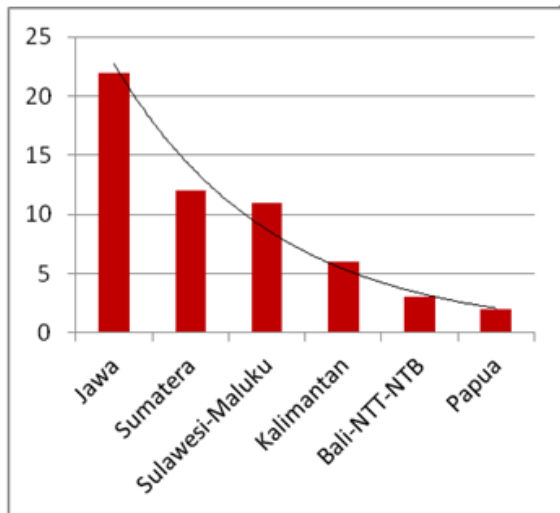
Selanjutnya, tabel 3 di bawah ini, menampilkan distribusi kandidat menurut wilayah yang dibagi ke dalam enam wilayah yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku, Kalimantan, Bali-NTT-NTB, dan Papua. Tabel tersebut menunjukkan distribusi kandidat yang tidak merata, terkonsentrasi di Jawa (39,29%), Sumatera (21,43%) dan Sulawesi-Maluku (19,64%). Selain itu, terlihat bahwa sebagian besar kandidat perempuan yang menang berada di Jawa mencapai 54,17%. Walaupun demikian, prosentase kemenangan kandidat perempuan terbesar berada di Bali-NTT-NTB (Tabanan, Karangasem, Bima) yang mencapai 100%.

Tabel 3. Distribusi Kandidat dan Prosentase Kemenangan Perempuan dalam Pilkada Langsung serentak, 9 Desember 2015

	Kandidat		Menang		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Jawa	22	39,29	13	54,17	59
Sumatera	12	21,43	1	4,17	8
Sulawesi-Maluku	11	19,64	4	16,67	36
Kalimantan	6	10,71	3	12,50	50
Bali-NTT-NTB	3	5,36	3	12,50	100
Papua	2	3,57	0	0,00	0
Total	56	100,00	24	100,00	43

Sumber: diolah dan dikelompokkan oleh penulis berdasarkan data dari laman KPU tahun 2015

Analisis korelasi pada level provinsi menunjukkan hubungan antara keberadaan perempuan calon bupati/walikota dengan distribusi perguruan tinggi nilainya rendah. Namun, jika diagregasi pada level yang lebih tinggi pada level wilayah (Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku, Kalimantan, Bali-NTT-NTB, dan Papua) terlihat sebaran kandidat perempuan yang sangat mirip dengan sebaran perguruan tinggi baik (Grafik 6). Agregasi data perguruan tinggi pada level wilayah yang lebih tinggi ini secara sederhana dapat menunjukkan pola sebaran yang terjadi. Selain itu, persebaran penduduk dalam menempuh pendidikan tinggi lebih kami anggap dapat lebih dijelaskan oleh persebaran perguruan tinggi di level wilayah tersebut dibanding membatasinya pada level provinsi.



Ket: Balok warna biru (kiri) menunjukkan jumlah perempuan kandidat kepala daerah

Balok warna merah (kanan) menunjukkan jumlah perguruan tinggi

Sumber: diolah dan dikelompokkan oleh penulis berdasarkan data dari laman KPU tahun 2015...?

Grafik 6. Jumlah Perempuan Calon Bupati/Walikota pada Pilkada Langsung 2015, dan Jumlah Perguruan Tinggi

Balok warna biru (di bagian kiri) menggambarkan jumlah perempuan kandidat kepala daerah dimana paling banyak berada di Jawa (22 orang), kemudian disusul Sumatera (12 orang), Sulawesi-Maluku (11), dan kemudian dalam jumlah yang lebih sedikit di Kalimantan (6 orang), Bali-NTT-NTB (3 orang), dan terakhir adalah Papua (2 orang). Ternyata salah satu penjelasan yang masuk akal mengapa jumlah perempuan kandidat kepala daerah cenderung

terkonsentrasi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku adalah terkait dengan fakta keberadaan perguruan tinggi yang juga terkonsentrasi paling banyak di Jawa, menyusul Sumatera, lalu Sulawesi-Maluku. Sementara jumlah perguruan tinggi semakin sedikit di Kalimantan, lalu Bali-NTT-NTB, dan Papua.

Perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang bisa menjelaskan perbedaan signifikan jumlah perempuan kandidat kepala daerah di Jawa dan daerah-daerah lainnya karena melalui perguruan tinggi yang banyak tersebut, karena perguruan tinggi menjadi tempat penyebaran ide-ide baru, diskusi-diskusi mengenai perkembangan demokrasi, termasuk perkembangan dari luar meyangkut persoalan kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, masyarakat banyak terutama yang hidup dan berada di sekitar daerah tersebut, akan memiliki kesempatan eksposur yang lebih banyak terhadap ide dan perkembangan baru termasuk persoalan kepemimpinan perempuan.

Peran strategis perguruan tinggi, sebagai pusat diseminasi ide-ide, menggagas nilai-nilai ideal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitarnya, bahkan penemuan-penemuan revolusioner dalam sejarah peradaban manusia telah teruji ratusan tahun dalam berbagai lintasan sejarah bahkan sejak zaman ‘*Renaissance*’ (pencerahan).⁴⁴ Dalam konteks inilah, penelusuran lebih jauh memperlihatkan bahwa sejak masa kolonial Belanda, Jawa dan Madura adalah daerah dengan jumlah penduduk terpadat disebabkan beberapa hal di antaranya keberadaan tanah lahan pertanian yang subur, jumlah intensitas hujan yang tinggi, dan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan yang banyak dilakukan pemerintah Belanda.⁴⁵ Konsentrasi pembangunan berbagai fasilitas pendidikan di Jawa yang berbeda dengan daerah lainnya terus berlanjut pada masa setelah kemerdekaan. Apalagi ditambah dengan pergerakan kaum muda Muslim dalam gerakan *tarbiyah* tahun 1980an di universitas-universitas di Jawa (ITB, UGM,

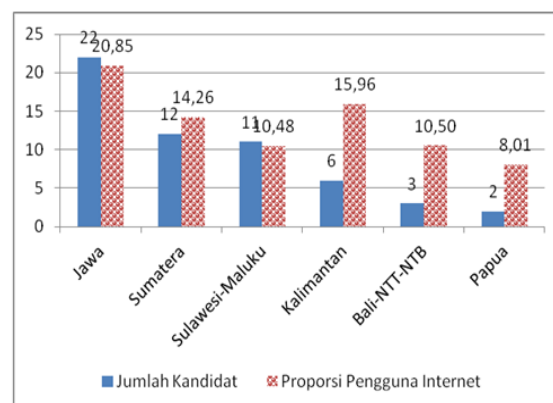
⁴⁴ Doris Wilkinson, “Transforming the Social Order: The Role of the University in Social Change”, *Sociological Forum*, vol. 9, no. 3 (September 1994), hlm.327-328, <http://www.jstor.org/stable/684706> (diakses pada 23 Agustus 2016)

⁴⁵ Lihat Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, *Towards Social Welfare in Indonesia* (Jakarta: Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia, 1954), hlm. 11.

IAIN) sebagai bagian gerakan kebangkitan Islam tahun 1970an menjadi salah satu katalis penting bagi ide-ide progresif untuk bermunculan. Patut dicatat pula bahwa sejak awal tahun 1990an, para aktifis Muslim di Jakarta menyebarkan gagasan-gagasan feminis Muslim melalui Jurnal *Ulumul Qur'an* dengan menentang pemikiran dan tulisan Ashgar Ali Engineer, Riffat Hasan, dan Fatima Mernissi. Kemudian secara perlahan muncul figur-figur berpengaruh dalam wacana kesetaraan gender dalam Islam seperti Wardah Hafidz, Siti Musdah Mulia, Lili Zakiyah Munir, Farha Ciciek, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Lies-Marcos Natsir, Nasaruddin Umar, dan KH. Husein Muhammad.

Melihat dinamika yang terjadi di perguruan tinggi dan komunitas intelektual sedemikian rupa, maka tidak mengherankan catatan Sita van Bemmelen dan Mies Grijn (2005) bahwa meskipun tren kemunculan para perempuan Muslim yang semakin percaya diri dalam politik tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Jawa adalah pusat berbagai pendidikan, pusat gerakan Islam tradisional dan Islam modernis yang paling berpengaruh, di mana sebagian besar para penggiat wacana gender (dalam Islam) berasal.⁴⁶

Selanjutnya, tulisan ini melihat secara lebih jauh mengenai bagaimana arus informasi sangat penting dalam membentuk keterbukaan masyarakat dalam menerima nilai-nilai maupun ide-ide baru. Sebelumnya dalam analisis korelasi telah disebutkan bahwa terdapat hubungan dengan nilai yang sedang antara keberadaan perempuan calon bupati/walikota dengan proporsi pengguna internet pada level provinsi. Grafik 7 menunjukkan sebaran kedua variabel tersebut pada tingkat agregasi yang lebih tinggi atau level wilayah.



Sumber: www.kpu.go.id dan www.bps.go.id; dihitung oleh penulis.

Grafik 7. Jumlah Perempuan Kandidat Kepala Daerah pada Pilkada Langsung Serentak 9 Desember 2015 dan Persentase Pengguna Internet

“Internet” dalam hal ini merujuk pada jaringan elektronik yang menghubungkan orang-orang dan informasi melalui komputer dan sarana lainnya yang memungkinkan komunikasi dan saling memberikan informasi orang-per-orang.⁴⁷ Penggunaan internet secara massif oleh berbagai kalangan mulai merebak sejak tahun 1990an, yang semula terbatas pada laman lembaga-lembaga tertentu, dan bersifat pasif. Kemudian sejak tahun 2000an, penggunaan internet semakin berkembang ke komunikasi digital dua arah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan sebagainya. Jadi, internet menyajikan kemudahan bagi siapa saja yang memiliki komputer dan jaringan untuk mengakses beragam informasi apa saja, dari mana saja, termasuk di dalamnya ide, gagasan, atau praktik terkait persoalan gender atau kepemimpinan perempuan yang muncul di negara lain. Internet memiliki peran strategis sebagai salah satu kekuatan politik, karena internet memungkinkan orang berjejaring melalui media sosial, menjadi sebuah komunitas besar lintas benua dan negara, di mana akses informasi menjadi lebih mudah, cepat, termasuk untuk

⁴⁶ Sita van Bemmelen and Mies Grijns, “What Has Become of The Slendang? Changing Images of Women and Java,” dalam Hans Antlov and Jorgen Hellman (eds), *The Java That Never Was: Academic Theories and Political Practices* (USA and London: Transaction Publisher, 2005), hlm 115.

⁴⁷ Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, W. Russell Neuman and John P. Robinson, “Social Implications of the Internet”, *Annual Review of Sociology*, vol. 27 (2001): 307-336, hlm. 307 <http://www.jstor.org/stable/2678624> (diakses pada 23 Agustus 2016).

melakukan mobilisasi kolektif melakukan sebuah gerakan perubahan.⁴⁸

Melihat betapa strategisnya peran internet dalam penyebaran ide dan gagasan secara luas dan massif, maka tulisan ini menyajikan Grafik 7 tersebut. Grafik 7 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perempuan (calon) kepala daerah terkonsentrasi di wilayah yang memiliki proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir dengan nilai yang tinggi. Hal ini sekaligus menjawab asumsi ketiga tulisan ini bahwa eksposur yang lebih banyak terhadap ide dan perkembangan tentang demokrasi dan kesetaraan gender melalui perguruan tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki akses internet, di daerah yang bersangkutan menjadi salah satu pendorong banyaknya jumlah kandidat perempuan sebagai kepala daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana arus informasi sangat penting dalam membentuk keterbukaan masyarakat dalam menerima nilai-nilai maupun ide-ide baru, termasuk persoalan gender dan perempuan sebagai pemimpin.

Penutup

Tulisan ini didasari ketertarikan yang mendalam untuk melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi yang kemungkinan memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada Langsung 9 Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa dari 179 kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan *gini ratio* (ketimpangan pendapatan) tidak berkorelasi dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang menang.

Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Lembaga perguruan tinggi dalam hal ini universitas menjadi menjadi salah satu katalis penting bagi ide-ide progresif

untuk bermunculan, termasuk dalam wacana mengenai perempuan sebagai pemimpin atau kandidat dalam Pilkada Langsung. Sementara itu, tulisan ini juga menemukan bahwa eksposur masyarakat di daerah terhadap ide-ide baru melalui internet menjadi salah satu pendorong banyaknya jumlah kandidat perempuan sebagai kepala daerah di daerah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bagaimana arus informasi sangat penting dalam membentuk kesadaran dan keterbukaan masyarakat dalam menerima ide-ide baru, termasuk persoalan gender dan perempuan sebagai pemimpin.

Temuan dan analisis tulisan ini berhasil menampilkan sisi-sisi lain yang selama ini belum terungkap. Melalui pendekatan kuantitatif, tulisan ini tidak saja mampu menampilkan data-data yang belum tergali untuk menunjukkan dinamika sosial ekonomi di daerah-daerah di mana para perempuan kepala daerah berasal, sebagai bagian upaya memahami fenomena kemunculan para perempuan sebagai kepala daerah di Indonesia secara lebih utuh.

Pada akhirnya, tulisan ini hendak menggarisbawahi dua hal penting: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun. Hal ini menjadi sebuah berita positif bagi perempuan Indonesia. Karena perempuan di daerah mana saja di Indonesia, tidak peduli dalam kondisi masyarakat dengan IPM tinggi atau rendah, tingkat kemiskinan tinggi atau rendah, dan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi atau rendah, tetap dapat muncul sebagai calon kepala daerah. *Kedua*, penyebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet di suatu daerah menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah. Hal ini menyiratkan pesan pentingnya upaya untuk terus menerus membuka akses pendidikan dan komunikasi ke daerah-daerah terbelakang (kawasan Indonesia timur) untuk memperbesar eksposur masyarakat terhadap gagasan-gagasan baru, dan meningkatkan imajinasi mereka mengenai kiprah progresif perempuan Indonesia dalam politik. Jika dikaitkan dengan *'agency'* sebagai salah satu dimensi dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi memang menjadi salah satu kunci penting

⁴⁸ Clay Shirky, "The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change", *Foreign Affairs*, vol. 90, no. 1 (January/February 2011): 28-41, <http://www.jstor.org/stable/25800379> (diakses pada 23 Agustus 2016).

bagi perempuan untuk meningkatkan modal individu (*individual capital*). Jadi, dengan memperbanyak jumlah perguruan tinggi di suatu daerah tidak saja akan memperbesar exposure masyarakat terhadap dinamika gagasan-gagasan baru yang berkembang. Namun lebih dari itu, akan memperbanyak pilihan bagi seorang perempuan dalam upaya memenuhi 'agency'-nya yaitu meningkatkan kapasitas dirinya, memperoleh kepercayaan diri, sebagai modal mendasar untuk berkiprah di ruang publik, dengan berbagai pilihan pendidikan di daerahnya maupun di tempat lain.

Referensi

Buku

- Blackburn, Susan., Bianca J Smith, Siti Syamsiyatun. "Introduction", dalam Susan Blackburn, Bianca J. Smith, Siti Syamsiyatun (eds). *Indonesian Islam in A New Era: How Women Negotiate Their Muslim Identities*. Clayton: Monash University Press. 2008.
- Boserup, Ester. *Woman's Role in Economic Development*. Great Britain: George Allen and Unwin. 1970.
- Chowdhry, Geeta. "Engendering Development: Women in Development (WID) in International Development Regimes", dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.). *Feminism/Postmodernism/Development*. London and New York: Routledge. 1995.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, ed., *Kebangkitan Perempuan Tabanan dalam Politik Lokal*. Tangerang: Mahara Publishing, 2016.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*. Singapore: NUS Press and Kyoto University Press, 2015.
- Mahmood, Saba. *Politics of Piety: the Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005.
- Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. *Towards Social Welfare in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia. 1954.
- Mosser, Caroline. "Gender Planning in the third World: Meeting Practical and Strategic Needs", dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.). *Gender and International Relations*. Suffolk: Open University Press. 1991.
- Norris, Pippa. "Introduction: Theories of Recruitment," dalam ed. Pippa Norris (ed). *Passage to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Great Britain: Cambridge University Press. 1997.
- Norris, Pippa., and Joni Lovenduski, *Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament*. Great Britain: Cambridge University Press. 1995.
- O'Donnell, Guillermo. "Human Development, Human Rights, and Democracy," dalam Guillermo O'Donnell, Jorge Vargas Cullell, Osvaldo M. Iazzetta (eds.). *The Quality of Democracy Theory and Applications*. USA: University of Notre Dame Press. 2004.
- Rogers, Barbara. *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies*. London and New York: Routledge. 1980.
- Rowlands, Jo. *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*. UK and Ireland: Oxfam. 1997.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf. 1999.
- Terjesen, Siri, 'A. Sen's 'Development as freedom', January 2004, <https://www.researchgate.net/publication/27466009> (diakses pada 16 Agustus 2016)
- Tinker, Irene, ed., *Persistent Inequalities: Women and World Development*. New York: Oxford University Press. 1990.
- Van Bemmelen, Sita and Mies Grijns. "What Has Become of The Slendang? Changing Images of Women and Java," dalam Hans Antlov and Jorgen Hellman (eds). *The Java That Never Was: Academic Theories and Political Practices*. USA and London: Transaction Publisher. 2005.
- Yayasan SATUNAMA, "Perempuan di Pilkada Serentak 2015: Perspektif dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada," Yayasan SATUNAMA, Yogyakarta, 2015.
- Young, Kate. "Gender and Development" dalam Nalini Visvanathan, and others, (eds). *The Women, Gender and Development Reader*, London and New Jersey: Zed Books. 2000.

Jurnal

- Amrullah, Eva F. "Seeking Sanctuary in 'the age of disorder': Women in Contemporary Tablighi Jama'at," *Contemporary Islam* 5/2, (2011): 135-160.

- Batliwala, Srilatha. "Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account", *Development in Practice*, vol. 17, no. 4/5 (August 2007): 558
- DAWN. "Rethinking Social Development: DAWN's Vision," *World Development* 23, no.11(1996).
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "Profiles, Statuses and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections," *Indonesian Feminist Journal*, vol.3, no. 1 (August 2015): 47-52.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "Perspectives Versus Practices: Women's Leadership in Muhammadiyah", *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, vol. 23/2, October 2008: (161-185)
- DiMaggio, Paul., Eszter Hargittai, W. Russell Neuman and John P. Robinson. "Social Implications of the Internet", *Annual Review of Sociology*, vol. 27 (2001): 307, <http://www.jstor.org/stable/2678624> (diakses pada 23 Agustus 2016).
- Kabeer, Naila. "Resource, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment", *Development and Change*, vol. 30 (1999): 437-438.
- Lipset, Seymour Martin. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy," *The American Political Science Review*, vol. 53, no. 1 (Mar., 1959): 69-105.
- Mahmood, Saba. "Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agents: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival," *Cultural Anthropology* 16, no. 2 (May 2001), 225
- Oxaal, Zoe and Sally Baden. "Gender and Empowerment: Definitions, Approaches, and Implications for Policy," *BRIDGE Development – Gender Report*, no. 40 (October 1997).
- Perludem. "Evaluasi Pilkada Serentak 2015," *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, no. 8 (April 2016).
- Robinson, Kathryn. "Indonesian Women's Rights, International Feminism and Democratic Change," *Communal/Plural* 6, no.2 (1998): 212.
- Shirky, Clay. "The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change", *Foreign Affairs*, vol. 90, no. 1 (January/February 2011), <http://www.jstor.org/stable/25800379> (diakses pada 23 Agustus 2016).
- Wilkinson, Doris. "Transforming the Social Order: The Role of the University in Social Change", *Sociological Forum*, vol. 9, no. 3 (September 1994) : 327-328, <http://www.jstor.org/stable/684706> (diakses pada 23 Agustus 2016)

Thesis

- Safira Machrusah, "Muslimat Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia" (Master thesis, the Australian National University, 2005).

Paper

- Achmad, Sjamsiah. "Perempuan Dalam Politik: Kampanye 50-50 Asia Pasifik 2005, Indonesia Kapan". Paper 13 April 2001, Jakarta, hlm. 1.
- Desai, Manisha. "Hope in Hard Times: Women's Empowerment and Human development". United Nations Development Programme, Human Development Research Paper 2010/14, July 2010, hal. 4.
- PERLUDEM, "Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Properempuan". Jakarta, 20 Desember 2015.

Surat Kabar

- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2005. "Menjenderkan Pemerintahan Daerah", *KOMPAS*, 15 Februari.
- Dewan Perwakilan Daerah-Republik Indonesia, 2015, "DPD evaluasi Pilkada serentak 2015", 18 Desember 2015, dalam <http://dpdri.merdeka.com/berita/dpd-evaluasi-pilkada-serentak-2015-151218o.html>, diunduh 81 Agustus 2016.
- Munir, Lili Zakiyah. "Islam, Gender and Equal Rights for Women," *The Jakarta Post*, December 10, 2002.
- Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), "Pilkada Serentak Telah Usai, Ini Evaluasi Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII", 18 Januari 2016, dalam <http://www.berita9online.com/nasional/pilkada-serentak-telah-usai-ini-evaluasi-pusat-studi-hukum-konstitusi-fh-iii/>, diunduh 18 Agustus 2016.

Sumber Online

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8/2015 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang", <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1627.pdf>, diunduh 18 Agustus 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 tentang “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, http://jdih.kpu.go.id/data/data_tematik/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf, diunduh 8 November 2016.

TENTANG PENULIS

Ahmad Helmy Fuady

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: elhelmy@yahoo.com

Eka Suaib

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi “Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul “Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan”. Email: ekasuaib1966@gmail.com

Irhamna Irham

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamna.irham@gmail.com

Kadek Dwita Apriani

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: kadek88@gmail.com.

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hak-hak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari *Faculty of Aian Studies* Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President’s Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul *Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

La Husen Zuada

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: husenzuadaui@gmail.com

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Peneliti yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: hasim_nur@yahoo.com

Nostalgawan Wahyudi

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan_jauzy@yahoo.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis

diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiewieqsz@yahoo.com.au

Waode Syifatu

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

Yusuf Maulana

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

